



**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
BULAN APRIL, MEI, JUNI
(TRIWULAN II)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254
Palembang
Telpon/Fax (0711) 314004
Email dp3asumsel@gmail.com
Website dpppa@sumselprov.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Tujuan;	4
2. Sasaran;	4
3. Belanja, Program APBD :	4
a) Belanja Perangkat Daerah;	4
b) Program dan Anggaran APBD;	4
4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD);	8
5. Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kewilayahan (lokasi).	9
b. Latar Belakang Penyusunan Laporan	10
1. Maksud;	10
2. Tujuan.	10
II EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD SAMPAI BULAN JUNI TAHUN 2026	11
a. Realisasi Belanja APBD	12
1. Realisasi Total Belanja Daerah	12
2. Realisasi Belanja Operasi	12
3. Realisasi Belanja Modal	12
b. Indikator Kinerja OPD	16
c. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah Tahun 2025	16
III KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT	16
IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

Tabel Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Bulan April, Mei, Juni Tahun 2026

LAPORAN PELAKSANAAN
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

Sesuai dengan **UU Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintah Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dengan **6 (enam) sub urusan**, yaitu:

1. Kualitas Hidup Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pelebagaan** Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi.
- b) **Pemberdayaan perempuan** bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.

2. Perlindungan Perempuan

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan kekerasan** terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinnasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

3. Kualitas Keluarga

Dengan kewenangan :

- a) **Peningkatan** kualitas keluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kab/ kota.

- b) **Penguatan dan pengembangan** LPLPKK (Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga) dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kab/ kota.
- c) **Penyediaan layanan** bagikeluarga dalam mewujudkan KG (Kesetaraan Gender) dan hak anak yang wilayahkerjanya lintas daerah kab/kota.

4. **Sistem Data Gender dan Anak**

Dengan kewenangan :

Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.

a. **Pemenuhan Hak Anak**

Dengan kewenangan :

- a) **Pelembagaan** PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi.
- b) **Penguatan dan Pengembangan** lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

b. **Perlindungan Khusus Anak**

Dengan kewenangan :

- a) **Pencegahan** kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
- b) **Penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi.
- c) **Penguatan dan pengembangan** lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota.

VISI SUMSEL Tahun 2025 – 2029

"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"

- Sumsel sebagai Provinsi yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Sumsel menjadi Provinsiberdaya saing, modern, Tangguh, inovatif dan adil

- Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, berkelanjutan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata Kelola yang baik.

MISI

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumberdaya yang berdayasaing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan rumah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Organisasi Perangkat Daerah mendukung terwujudnya Visi dan Misi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yaitu : **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”** dengan mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya yang berdayasaing, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak.

1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tujuan jangka menengah, sebagai berikut; Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

2. SASARAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran sebagai berikut ;

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- 2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
- 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

3. BELANJA PROGRAM APBD

a. Belanja Perangkat Daerah

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 12.990.005.660,-
Belanja Operasi	: Rp. 12.618.755.660,-
Belanja Pegawai	: Rp. 7.787.255.564,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.831.500.096,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 371.250.000,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 371.250.000,-

Pada bulan Mei terjadi Pergeseran Anggaran Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yaitu :

Belanja Daerah	: Rp. 12.745.387.660,-
Belanja Operasi	: Rp. 12.262.573.560,-
Belanja Pegawai	: Rp. 7.787.255.564,-
➤ Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 4.475.281.996,-
➤ Belanja Modal	: Rp. 482.850.100,-
➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 371.250.000,-
➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp. 111.600.100,-

b. Program dan anggaran APBD ;

Belanja tersebut terdiri atas 7 Program, 21 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- v. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 14. Fasilitas Kunjungan Tamu
 15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 17. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 21. Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- 2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - viii. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - 22. Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
 - ix. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - 23. Sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 - 24. Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi
 - x. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
 - 25. Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi
 - 26. Advokasi dan Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.
- 3) Program Perlindungan Perempuan
 - xi. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 27. Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
- xii. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 28. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 29. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- xiii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
- 30. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - xiv. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - 31. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
 - xv. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 32. Layanan Bimbingan Masyarakat Keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota
- 5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 - xvi. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
 - 33. Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui SIMFONI PPA

34. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi
- 6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- xvii. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
35. Advokasi dan Sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- xviii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
36. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak
- xix. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
37. Advokasi dan Sosialisasi pencegahan KtA kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi
- xx. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
38. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
39. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- xxi. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40. Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Kewenangan Provinsi.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (RENSTRA) dan Indikator Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029, Indikator Kinerja Utama yaitu:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2026
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,453
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,99 – 94,10
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	57,30
Meningkatnya Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,00
Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Persen	100
	Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang di selesaikan	Persen	100

Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 yang menjadi tugas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Pada Tahun 2025 - 2029 yaitu:

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	Persen	57,12	57,30	57,50	58,00	58,50
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,465	0,453	0,441	0,428	0,416
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,93-93,99	93,99-94,10	94,07-94,18	94,13-94,21	94,19-94,29
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi).

Berdasarkan kewilayahan, Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tersebar di beberapa lokasi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kab. Muara enim
- 2) Kab. OKI
- 3) Kab. OKUT
- 4) Kabupaten Lahat
- 5) Kabupaten OKU Selatan
- 6) Kabupaten Banyuasin
- 7) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba)
- 8) Kota Pagar Alam
- 9) Kota Prabumulih
- 10) Kabupaten Ogan Ilir
- 11) Kota Lubuk Linggau
- 12) Kabupaten Empat Lawang
- 13) Kabupaten PALI
- 14) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)
- 15) Kabupaten Musi Rawas
- 16) Kabupaten OKU
- 17) Kota Palembang
- 18) Lintas Provinsi

B. Latar Belakang Penyusunan Laporan

i. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan ini adalah memenuhi amanat Surat Edaran Gubernur Nomor : 027/SE/BAPPEDA/2018 tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2018. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta terciptanya kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan.

ii. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Povinsi Sumatera Selatan.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan ini pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah.

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target s.d. Bulan Juni	Realisasi s.d. Bulan Juni	Target s.d. Bulan Juni	Realisasi s.d. Bulan Juni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3/2 *100%)	(6)	(7)
Total Belanja	12.745.387.660,-	5.119.794.003,-	100	40.16	100	49,07
Belanja Operasi	12.262.537.560,-	4.748.608.923,-	100	38.72	100	40,00
- Belanja Pegawai	7.787.255.564,-	3.659.076.780,-	100	46,98	100	46,98
- Belanja Barang dan Jasa	4.475.281.996,-	1.089.532.143,-	100	24,34	100	26,30
Belanja Modal	482.850.100,-	371.185.110,-	100	76,87	100	78,10
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.250.000,-	371.185.110,-	100	99,98	100	100
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.600.100,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan April sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp. **12.745.387.660,-** terealisasi sebesar Rp. **5.119.794.033,-** atau 40,16% dan realisasi fisik 49,07%.

2) Realisasi Belanja Operasi

Realisasi Keuangan Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan April sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp.**12.262.537.560,-** terealisasi Rp. **4.748.608.923,-** atau 38,72% dan realisasi fisik 40,00 %, terdiri dari

- Belanja Pegawai Rp.7.787.255.564,- terealisasi Rp.3.659.076.780,- atau 46,98% dan realisasi fisik 46,98 %
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.475.281.996,- terealisasi Rp.1.089.532.143,- atau 24,34% dan realisasi fisik 26,30 %.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Keuangan Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan April sampai dengan Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp. **482.850.100,-** terealisasi **Rp. 371.185.110,-** atau **76,87%** dan realisasi fisik 78,10%, terdiri dari

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin April sampai dengan Juni Tahun Anggaran 2026 dari pagu Rp.371.250.000,- terealisasi Rp.371.185.110,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100 %
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran 2026 dari pagu Rp.111.600.100,- terealisasi Rp. 0 atau 0,00 % dan realisasi fisik 0,00 %.

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Penyediaan Dana	Lokasi	Target Keuangan (%)	Realisasi		
					Keuangan		Fisik
					(Rp)	%	%
1	2	3	4	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.121.010.660		83,09	5.010.961.181	49.51	50.00
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000		100,00	2.000.000	50,00	60,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000	Palembang	100,00	2.000.000	100,00	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	20,00
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.924.755.564		85,10	3.952.909.853	49,88	51,45
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.787.255.564	Palembang	84,86	3.882.945.380	49,86	51,30
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.000.000	Palembang	98,04	57.000.000	51.82	52.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.500.000	Palembang	100,00	12.964.473	47,14	49,00
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0		0,00	0	0,00	0
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	Palembang	0,00	0	0,00	0
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.800.000		100,00	12.349.720	15.67	17.58
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	Palembang	100,00	0	0,00	0
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.800.000	Palembang	100,00	12.349.720	25,31	27,58
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.686.900		87,04	542.560.820	68.27	70.00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	Palembang	83,33	0	0,00	0
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300.000.000	Palembang	100,00	299.949.750	99,98	100,00
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.250.000	Palembang	100,00	71.235.360	99,98	100,00
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000	Palembang	56,67	74.534.065	49.69	50,00

13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	Palembang	60,00	20.941.000	59,83	60,20
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	Palembang	26,67	7.370.000	24,57	26,23
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.436.900	Palembang	100,00	68.530.645	34,89	35,00
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.333.152		74,93	405.946.237	45,34	46,20
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	Palembang	100,00	4.000.000	100,00	100,00
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	249.165.152	Palembang	67,83	109.222.737	43,84	44,40
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	642.168.000	Palembang	77,84	292.723.500	45,58	46,67
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	423.435.044		81,40	95.194.551	22,48	39,00
19	penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	280.000.000	Palembang	71,43	85.744.551	30,62	40,52
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.834.944	Palembang	62,82	9.450.000	29,68	32,00
21	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	111.600.100	Palembang	0,00	0	0,00	0,00
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.061.382.000		45,75	219.228.360	20,65	21,00
viii	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	100.000.000		48,00	29.018.440	29,02	31,40
22	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	100.000.000	Palembang	48,00	29.018.440	29,02	31,10
ix	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.000.000		54,05	18.367.570	24,82	26,72
23	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	0	Palembang	0,00	0	0,00	0,00
24	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	74.000.000	Palembang	54,05	18.367.570	24,82	26,00
x	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	887.382.000		44,84	171.842.350	19,37	20,10
25	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	32.000.000	Palembang	19,94	2.177.000	6,80	7,20
26	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan KewenanganProvinsi	855.382.000	Palembang	48,77	169.665.350	19,84	21,00
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	333.476.000		67,59	82.174.020.	25,40	26,00
xi	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000		47,24	0	0,00	5,00
27	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	55.000.000	Palembang	47,27	0	0,00	5,00
xii	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	168.476.000		54,98	56.944.810	33,80	34,00
28	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	Palembang	54,18	21.020.100	21,02	21,50

29	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	68.476.000	Palembang	55,19	35.924.710	52,46	54,00
xiii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000		100,00	25.229.210	25.23	26.50
30	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	100.000.000	Palembang	100,00	25.229.210	25.23	26.50
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	43.250.000		53,58	2.494.000	0,00	0
xiv	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	20.750.000		24,10	0	0,00	0
31	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	20.750.000	Palembang	24,10	0	0,00	0
xvi	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000		100,00	2.494.000	11.08	12.00
32	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	22.500.000	Palembang	100,00	2.494.000	11.08	12.00
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	113.380.000		34,88	22.444.746	19.80	20,00
xvii	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	113.380.000		34,88	22.444.746	19.80	20,00
33	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	42.600.000	Palembang	54,69	12.966.800	30,44	33,15
34	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	70.780.000	Palembang	22,96	9.477.946	13.39	15,00
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.365.000		100,00	63.464.465	30.46	31.33
xviii	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	75.000.000	Palembang	100,00	35.473.977	47,30	49,60
35	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	75.000.000	Palembang	100,00	35.473.977	47,30	49,60
xix	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	133.365.000		100,00	27.990.488	20.99	21.10
36	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	133.365.000	Palembang	100,00	27.990.488	20.99	21.10
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	874.524.000		69,30	246.886.871	17.54	19.09
xx	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	142.525.000		100,00	24.998.000	17,54	19.09
37	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	142.525.000	Palembang	100,00	24.998.000	17,54	19.09

xxi	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	331.524.000		62,48	109.324.321	32.98	33,00
38	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	261.524.000	Palembang	63,29	68.475.300	26.18	27,00
39	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	Palembang	59,29	40.849.021	58.36	59.10
xxii	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	400.475.000		64,04	112.564.550	28.11	30,00
40	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia LayananPenanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	400.475.000	Palembang	64,04	112.564.550	28.11	30,00
	Jumlah	12.745.387.660		78,48	5.647.653.643	44.31	52.50

DAK Non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) adalah dana APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai program/ kegiatan prioritas nasional di bidang peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui, peningkatan kualitas anak dan perempuan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan perlindungan perempuan dan anak di daerah.

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

TAHUN ANGGARAN 2026

PROVINS ::PROVINSI SUMATERA SELATAN

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bulan: Juni 2026

No	SUB BIDANG / KEGIATAN		PERENCANA KEGIATAN				REALISASI S.D. TRIWULAN INI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan	
			Vol	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK NONFISIK	Keuangan		Fisik			
						(Rp)	(Rp)	(%)	Vol	(%)		
1	2		3	4	5	6	12	13	14	15	16	
1	Perlindungan Perempuan dan Anak											
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
		2.08.03.1.01.0007	1	Keg	50 Orang	14,500,000	14500000	100	1	100	Kegiatan dilaksanakan pada TW II	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										

		2.08.03.1.0 2.0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	50	Orang	50 Orang	99,920,000	41,093,000	41.13	1	50,00	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan korban yang teridentifikasi
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi										
		2.08.03.1.0 3.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	laporan	20 Orang	25,200,000	25,200,000	100	1	100	Kegiatan dilaksanakan pada TW II
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
		2.08.07.1.0 1.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	40	Lembaga	40 Lembaga	74,000,000	21,300,000	28.78	1	45,35	Kegiatan akan dilaksanakan TW II dan TW III
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi										
		2.08.07.1.0 2.0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota	50	Orang	50 orang	105,400,000	53,225,899	50.50	1	65,00	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan korban yang teridentifikasi
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota										
		2.08.07.1.0 3.0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	200	Orang	200 Orang	34,980,000	14,155,000	40.47	0	50.55	Kegiatan akan dilaksanakan TW II dan TW III
	Jumlah						354,000,000	169.473.899	47.87		53,48	

b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang tercantum pada Renstra DPPPA Sumsel 2025-2029 :

Indikator Kinerja OPD

Capaian Indikator Renstra Per Maret Tahun 2026 :

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.453	0,458	98,91
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.99 – 94,10	93,22	99,24
Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	57,30	55,35	96,60
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.00	69,56	105,39
Persentase Kasus Kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	%	100	76,00	82,00
Persentase Kasus Kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100	82,00	83,00

a. PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Bulan Januari Sampai dengan Bulan Maret Tahun 2026 belum ada Penghargaan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Kebijakan/Peraturan tentang proses Penatausahaan Keuangan yang berubah/berganti
- Kesiapan PPTK untuk melaksanakan kegiatan belum maksimal
- Adanya Dokumen DPA yang harus direvisi
- Adanya kegiatan mendadak yang tidak terjadwal seperti panggilan acara di kementerian, rapat/pelatihan di provinsi.

Tindaklanjut yang diperlukan :

- Koordinasi ke PPTK tentang jadwal kegiatan seluruh program kegiatan sehingga setiap PPTK dapat memperhitungkan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan kondisi.

- Koordinasi dengan BPKAD mengenai kebijakan penatausahaan keuangan agar setiap proses sesuai dengan peraturan yang ada.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholders terkait dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten/kota dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya **laporan yang lebih terinci menjadi lampiran** pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Juli 2026

KEPALA DINAS



Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 197306261993111001